
STRATEGI POLITIK DAN KEMENANGAN GOLKAR DI SEMARANG PADA PEMILU 1971

Nia Endra Puspita

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
historiaunnes@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is (1) determine the development of Golkar in Semarang from year 1964 to 1971 (2) determine a winner Golkar in the 1971 election (3) know the Golkar political strategy for the elections. Historical method is the method used in this study. Based on the results of the study concluded that the establishment of Golkar motivated by political conflict caused by the disruption of the banned and the riots that occurred in Semarang. The solution to this conflict, the military establish a forum for groups that are not affiliated with a particular political Sekber name Golkar in 1964. In the 1971 election, Golkar Joint Secretariat for the first time became one of the candidates in the election In the 1971 election, Golkar Sekber investigators were able to gather from the city of Semarang. Political strategies used by Golkar to garner support voice over ABG Strip. Moreover, the theme of the campaign offered to give a new atmosphere in the world of politics.

Keywords: Political Strategy, Golkar, elections, Semarang .

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui perkembangan Golkar di Semarang dari tahun 1964-1971 (2) mengetahui Golkar menjadi pemenang dalam pemilu 1971 (3) mengetahui strategi politik Golkar dalam menghadapi pemilu. Metode sejarah merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa berdirinya Golkar dilatar belakangi oleh konflik politik yang disebabkan oleh gangguan organisasi terlarang dan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Semarang. Solusi untuk konflik ini, oleh pihak militer membentuk suatu wadah untuk golongan yang tidak berafiliasi pada politik tertentu dengan nama Sekber Golkar pada tahun 1964. Pada pemilu 1971, untuk pertama kalinya Sekber Golkar menjadi salah satu kandidat dalam pemilu Pada pemilu 1971, Sekber Golkar mampu mengumpulkan simpatisan dari masyarakat Kota Semarang. Strategi politik yang digunakan oleh Golkar untuk menghimpun dukungan suara melalui Jalur ABG. Selain itu, tema kampanye yang ditawarkan memberi suasana baru dalam dunia politik.

Kata kunci: Strategi Politik, Golkar, Pemilu, Semarang.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan cara untuk mencapai mufakat. Hal ini sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia yang demokrasi. Pemilihan umum 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia. Berdasarkan hasil pemilu 1955 di Semarang, terdapat tiga partai besar menduduki jumlah suara tertinggi. Partai-partai ini antara lain PKI, PNI, NU. Ketiga partai ini memiliki pengaruh yang cukup kuat di Semarang. Ketiga partai ini juga sangat mempengaruhi perilaku memilih dari masyarakat Kota Semarang.

Pemilihan umum kedua dilaksanakan pada tahun 1971, tepatnya empat tahun setelah Soeharto menjabat kursi Kepresidenan. Penyelenggaraan pemilu 1971 berdasarkan beberapa pertimbangan yang tertuang dalam Ketetapan No. XI/MPRS/1966, yaitu Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat, dan untuk pelaksanaan. Kedaulatan Rakyat diperlukan lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk melalui pemilihan umum. Sampai pada tahun 1966 belum terbentuk melalui pemilihan umum sehingga kehidupan demokrasi Indonesia belum berjalan lancar.

Pada pemilu 1971, keikutsertaan Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar pada awalnya mendapat pandangan sebelah mata dari pihak partai politik. Golkar dianggap tidak mampu memberi komunikasi politik yang cukup baik dan dapat menyaingi NU, PNI maupun Parmusi yang sudah memiliki kekuatan politik pada masa itu. Perpecahan dan kericuhan internal yang terjadi dalam tubuh partai-partai lain telah membuat tokoh-tokoh politiknya berpindah ke Golkar. Hasil pemilu ini di luar dugaan, Sekber Golkar sukses besar dengan perolehan suara mencapai 62,79% dari total perolehan suara.

Mayoritas penduduk Semarang adalah pemeluk agama Islam dan merupakan penganut paham nasionalis. Keadaan ini merupakan imbas dari hasil pemilu 1955 yang notabene telah dipegang oleh PNI dan NU. Hal ini menunjukkan tantangan

riil Golkar dalam menghadapi potensi kekuatan politik Islam dan politik nasionalis di Semarang. Menariknya, pada Pemilu Orde Baru, Golkar dengan kondisi tersebut mampu keluar sebagai pemenang dengan perolehan angka mencapai 50%.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah Empat langkah dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Pengumpulan data yang dilakukan diperoleh dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yakni dengan penggalian arsip-arsip terkait dengan pemilu 1971 di Semarang. Sumber sekunder yakni dengan menggunakan studi pustaka. Setelah proses pengumpulan data (heuristik), diadakan proses kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir kritik sumber. Kelanjutan proses ini untuk menyeleksi data yang diperoleh, menafsirkan dan menganalisis data, hingga akhirnya ditulis sehingga menjadi sebuah cerita sejarah mengenai Strategi Politik dan Kemenangan Golkar di Semarang pada Pemilu 1971.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 di Semarang

Sekber Golkar terbentuk pada tanggal 29 Oktober 1964. Sekber Golkar di cabang Semarang dipimpin Kol. Hadiyono, dengan kantornya yang berpusat di Jl. Pemuda. Berdirinya Sekber Golkar dilatar belakangi konflik yang ditimbulkan oleh PKI pasca kudeta 1965. Soekarno selaku presiden pada saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 193/1964 tentang penginstruksian organisasi-organisasi yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi. Berdasarkan keputusan ini, militer dengan konsep Dwifungsi

ABRI membentuk Sekber Golkar untuk menampung organisasi-organisasi yang tidak memiliki afiliasi politik pada golongan golongan tertentu.

Pada Pemilu 1971, untuk pertama kalinya Sekber Golkar menjadi salah satu kandidat pemilihan umum. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 1971. Hasil suara pada pemilu 1971 sangat diluar dugaan, dengan perolehan suara yang dimiliki Sekber Golkar sebanyak 50%. Sekber Golkar mampu menunjukkan kemampuan dalam bidang politiknya, mengingat Semarang merupakan basis PNI dan NU, namun Sekber Golkar mampu mendapatkan suara mayoritas dalam pemungutan suara.

Hasil jumlah suara yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa Golkar menduduki peringkat pertama, diikuti oleh Partai NU pada peringkat kedua, dan selanjutnya PNI pada peringkat ketiga. Jumlah suara yang telah diraih oleh Golkar pada pemilu 1971 ini diluar dugaan bagi para parpol-parpol lainnya. Bagi partai politik lain, terutama PNI dan NU yang merupakan partai besar dan notabene memiliki pengaruh yang lebih besar juga di Kota Semarang

Pemilu 1971 ini merupakan suatu prestasi di awal pemerintahan orde baru, karena pemilu ini mendapat animo yang cukup besar dari masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang. Pada hari pemungutan suara, banyak kegiatan warga yang terhenti untuk mengikuti pemungutan suara. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa pada pemilu 1971 mendapat animo yang tinggi dari masyarakat. Selain itu Golkar juga mendapat dukungan yang kuat juga dengan adanya inovasi yang ditawarkan melalui tema kampanyenya, yaitu pembangunan nasional.

Strategi Politik Golkar

Kemenangan Sekber Golkar dalam pemilu 1971 tidak semata-mata karena sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat Kota Semarang dari awal. Kemenangan ini diperoleh melalui proses yang cukup panjang, dengan strategi-strategi politik Golkar

guna memobilisasi dukungan suara masyarakat Kota Semarang. Strategi politik yang digunakan oleh Golkar terkenal dengan sebutan Jalur ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, Golkar.

Jalur ABRI ditempuh dengan Dwifungsi ABRI yang memiliki peran ganda, yaitu peran hankam (pertahanan dan keamanan) dan sospol (sosial-politik). Dwifungsi ABRI memiliki hegemoni yang cukup dapat diperhitungkan. Hegemoni ini diperoleh dari peran ganda yang dimiliki oleh ABRI. Secara khusus, militer yang mendukung kekuasaan Soeharto adalah Angkatan Darat karena karir Soeharto lahir dari Angkatan Darat. Peran ganda ini merupakan perluasan konsep “Jalan Tengah” yang dicetuskan oleh Jenderal Nasution yang kemudian disebut dengan Dwifungsi ABRI (Susilo, 2009:37-36). Peran ini sangat menguntungkan bagi Golkar dan militer, mengingat seluruh elit politik Golkar diduduki oleh Aparat TNI-AD pada khususnya. Menjelang pemilu 1971, dari pihak militer telah membentuk operasi kekaryaan. Operasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh dukungan suara untuk Sekber Golkar demi tegaknya ideologi Pancasila dan UUD 1945. Sasaran Operasi Kekaryaan ini diarahkan pada keluarga besar ABRI dan seluruh elemen masyarakat.

Jalur Birokrasi ditempuh dengan Peraturan Monoloyalitas PNS yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru. Pada 1966, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri No. 12 (Permen 12), yang menetapkan bahwa pegawai negeri tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota partai politik manapun. Peraturan yang kedua adalah, Peraturan Pemerintah No. 6/1970, yang menetapkan bahwa pegawai negeri hanya boleh memiliki “monoloyalitas” (Suryadinata, 1992:45). Peraturan ini berisi tentang kebijakan bagi PNS untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Sekber Golkar. wadah ini dimanfaatkan Golkar untuk menghimpun dan memobilisasi dukungan suara bagi Golkar saat pemungutan suara. Anggota Kokarmendagri yang terdiri atas pegawai-

pegawai Departemen Dalam Negeri ini diketuai oleh Letjen Amir Machmud, Jenderal kepercayaan Soeharto yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pada implementasinya peraturan monoloyalitas ini tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pada awalnya. Peraturan ini berlaku hanya sebagai alat mobilisator Golkar dalam menghimpun suara dari pegawai negeri sipil untuk memenangkan pemilu. Para pegawai negeri sipil dipaksa untuk memilih Golkar, bagi PNS yang *membangkang* akan diberhentikan atau dipecat, peraturan ini ditetapkan pada Peraturan Pemerintah.

Jalur Golkar ditempuh dengan menggunakan pembangunan nasional sebagai isu politiknya. Posisi Golkar yang berada di pihak pemerintah membawa Golkar untuk lebih mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Posisi ini menjadi media bagi Golkar untuk mengisi materi kampanye untuk menghadapi pemilu. Dalam menghadapi pemilu, Golkar lebih menonjolkan dalam bidang pembangunan. Pembangunan ini meliputi kestabilan politik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Golkar menciptakan alasan yang wajar bagi masyarakat untuk memilih Golkar karena keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan nasional merupakan isu politik Golkar untuk mencapai tujuan dalam memenangkan suara Tema Pokok dari pemilu 1971 adalah "Akselerasi Modernisasi" untuk Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun (Rauf, 2001:140). Golkar dengan programnya, yaitu Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang merupakan bagian dari Era Pembangunan menjadi simbol pembangunan dan modernisasi memberi citra sebagai jalan keluar menuju Indonesia modern. Program kampanye ini memberi nuansa baru dan memberi perbedaan bagi Golkar dibandingkan dengan partai-partai lainnya.

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mendukung pembangunan bangsa dalam arti luas, yaitu. Meliputi pengembangan nilai-nilai vital dasar, menumbuhkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, mengem-

bangkan bakat dan harkat manusia, memelihara dan mengembangkan lembaga serta cara-cara yang dipilih untuk berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila.

Strategi politik yang dilancarkan oleh Golkar pada pemilihan umum 1971 merupakan inovasi dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada umumnya, setiap partai mempunyai ideologi politik partainya masing-masing yang digunakan sebagai isu politik untuk menarik simpatisan masyarakat sehingga diharapkan mampu memperoleh banyak dukungan (suara). Golkar sebagai kelompok peserta pemilu tahun 1971, membawa isu politik baru dalam perkembangan dunia partai politik di Indonesia. Golkar membawa isu politik yang berorientasikan pada pelaksanaan *programatik* dan *pragmatic*. Hal ini yang dirasa penulis mempunyai andil cukup besar dalam mengambil simpati masyarakat untuk kemenangan Golkar pada pemilu 1971. Golkar mempunyai orientasi terhadap pembangunan yang pragmatik dan terprogram. Program ini terletak di setiap titik kekuatan sosial-politik. Di samping itu, kemampuan Golkar dalam memobilisasi dukungan suara tidak terlepas dari pola organisasinya yang terstruktur mirip dengan organisasi militer. Dengan pola organisasi yang terstruktur vertikal, komunikasi politik yang tercipta dalam tubuh Golkar menjadi sangat baik. Kuat dalam persatuan serta kecil kemungkinan terjadi konflik dalam tubuh Golkar. Bentuk Golkar sebagai sebuah kelompok masyarakat (bukan partai), juga merupakan strategi politik yang cukup menguntungkan Golkar dalam meraih suara pada pemilu tersebut. Dengan bentuknya sebagai kelompok masyarakat, Golkar bebas menerapkan kebijakan Monoloyalitas dan Dwifungsi ABRI untuk mendapatkan suara penuh dari para Pegawai Negeri dan ABRI (Asisten Teritorial Laksus Pangkopkamtib Daerah Djawa Timur, 1970).

SIMPULAN

Pembentukan Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964 serempak di seluruh nusantara, termasuk di Semarang. Latar belakang beririnya Golkar diawali oleh konflik politik yang pada saat itu. Konflik politik ini disebabkan karena gangguan dari PKI beserta ormas-ormasnya. Gangguan ini terjadi di luar maupun di dalam Front Nasional. Gangguan-gangguan ini menyebabkan minimnya keamanan di daerah sepanjang pantai utara, khususnya Semarang. Melihat situasi seperti ini, Sukarno selaku presiden saat itu mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 193/1964 untuk menghimbau kelompok-kelompok yang tidak tergabung dalam politik tertentu untuk bergabung dengan partai politik yang ada atau membentuk organisasi. Seiring berkembangnya organisasi Sekber Golkar, pada tahun 1971 untuk pertama kalinya Golkar menjadi salah satu peserta pemilu 1971 di Semarang. Pada saat itu, Sekber Golkar dipimpin oleh Kol. Hadiyono dengan kantornya yang terletak di Jl. Pemuda. Pertama kalinya Golkar menjadi pemenang dalam pemilu 1971 di Semarang.

Hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 dimenangkan oleh Golkar. Jumlah suara yang dominan dimenangkan oleh Golkar mencapai prosentase sebesar 50% dengan rincian sebagai berikut, 70.917 jumlah suara untuk pemilihan DPRD-II, 166.983 jumlah suara untuk pemilihan DPRD-I, 167.620 jumlah suara untuk pemilihan

DPR. Kemenangan Golkar ini dapat dicapai karena usaha dan kerjasama antara Golkar, Pemerintah, dan ABRI.

Strategi politik yang dilancarkan oleh Golkar untuk menghimpun dukungan suara masyarakat melalui jalur ABG yang masing-masing memiliki peranan sendiri-sendiri. Dari jalur ABRI dengan Dwifungsinya yang melaksanakan operasi kekaryaan yang memiliki sasaran di segala aspek sosial politik. Dari jalur birokrasi (pemerintah) yang mengeluarkan peraturan monoloyalitas PNS yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil menyalurkan aspirasi politiknya hanya ke Golkar. Dan yang terakhir dari Golkar, dengan tema kampanyenya yaitu, pembangunan nasional. Dengan adanya tema pembangunan nasional ini, mampu menawarkan Indonesia yang lebih maju untuk 25 tahun mendatang sejak pemerintahan orde baru sehingga memberi warna baru dalam dunia politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asisten Teritorial Laksus Pangkopkamtib Daerah Djawa Timur. 1970. *Tentang dan di Sekitar Era Pembangunan Tahun 1970-2000*. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah Djawa Timur.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryadinata, Leo. 1992. *Golkar dan Militer*. Jakarta: LP3ES
- Susilo, Adi Taufik. 2009. *Soeharto; Biografi Singkat 1921-2008*. Yogyakarta: Garasi.